



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
KEBUMEN

# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**TAHUN 2025 - 2029**



(0287) 384088



[kesbangpolkkebumen@gmail.com](mailto:kesbangpolkkebumen@gmail.com)



Jl. Arungbinang No. 15 Kebumen 54311

### **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2025 - 2029" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang kesatuan bangsa dan politik yang lebih baik di Kabupaten Kebumen. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kebumen, dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju kehidupan yang lebih harmonis, aman, dan sejahtera.

Kebumen, 19 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kabupaten Kebumen



IDIA MOKO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 196811281996031006

Daftar Isi

|                                                                                                                    | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                                              | ii      |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                                  | iii     |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....                                                                                | 1       |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                          | 1       |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                                          | 3       |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                       | 6       |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                   | 6       |
| <br><b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGGSA DAN POLITIK</b> ..... | 8       |
| 2.1. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL..                                                                         | 8       |
| 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                                                                  | 8       |
| 2.1.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol .....                                                                           | 17      |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol .....                                                                     | 23      |
| 2.1.4 Kinerja Keuangan Badan Kesbangpol .....                                                                      | 34      |
| 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesbangpol...                                                                 | 37      |
| 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL .....                                                         | 38      |
| 2.2.1 Permasalahan Layanan Badan Kesbangpol.....                                                                   | 38      |
| 2.2.2 Isu Strategis Daerah .....                                                                                   | 48      |
| <br><b>BAB III      TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....                                         | 51      |
| 3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kesbangpol.....                                                              | 51      |
| 3.2. Strategi Badan Kesbangpol .....                                                                               | 54      |
| 3.3. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol .....                                                                         | 55      |
| <br><b>BAB IV      PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....             | 57      |
| 4.1. Uraian Program dan Kegiatan .....                                                                             | 57      |

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator,<br>Target dan Pagu Indikatif .....                                                                         | 81 |
| 4.3. Uraian SubKegiatan Dalam Rangka Mendukung<br>Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                                                                    | 91 |
| 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan<br>Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun<br>2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama<br>Perangkat Daerah ..... | 97 |
| 4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja<br>Kunci (IKK) .....                                                | 98 |
| <b>BAB V      PENUTUP</b> .....                                                                                                                                 | 99 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun Renstra (Rencana Strategis). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Kebumen, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud untuk menyajikan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Renstra disusun sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mengemban amanah sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyusun beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan dapat mendukung

pencapaian target yang ditetapkan dengan memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I   Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat : tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat : permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

## **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.**

BAB III berisi Tujuan Renstra Perangkat Daerah, Sasaran Renstra Perangkat Daerah, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## **BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**

BAB IV memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V Penutup**

BAB V memuat diantaranya : kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### **2. 1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

###### A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen, tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

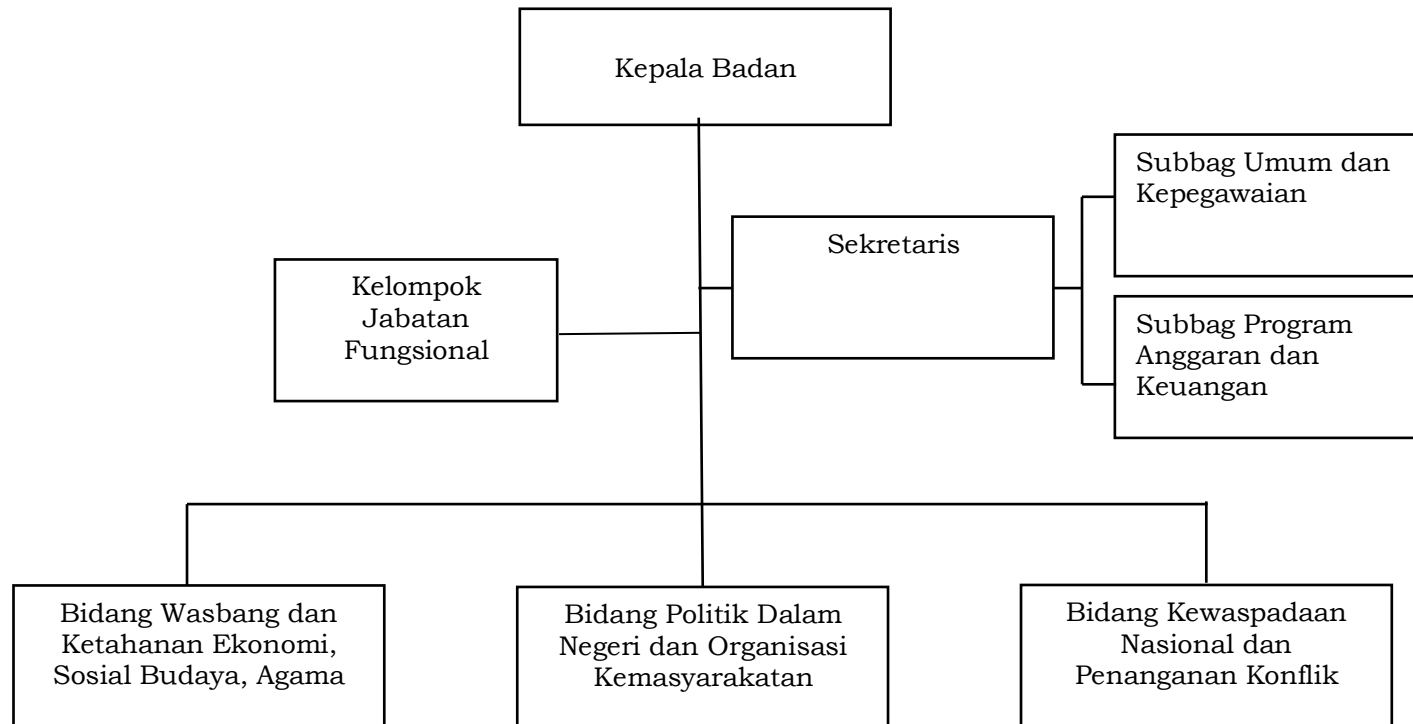
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### B. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**STRUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL KABUPATEN KEBUMEN**



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, uraian tugas jabatan struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

Mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

2. Sekretaris.

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan yaitu :

a. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial,

dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yaitu :

- 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- 2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;

- kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu :

- 1) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik.
- 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very*

*Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yaitu :

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, serta pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person*.
- b. Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan konflik.

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### A. Sumber Daya Aparatur.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen di klasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No | Jenis Kelamin | Tahun |      |      |      |      |
|----|---------------|-------|------|------|------|------|
|    |               | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1  | Laki-laki     | 16    | 16   | 17   | 18   | 20   |
| 2  | Perempuan     | 5     | 5    | 5    | 4    | 8    |
|    | Jumlah        | 21    | 21   | 22   | 22   | 28   |

Tabel 2.2  
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

| No | Uraian                                                                           | Jenis Kelamin |    | Jumlah |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------|
|    |                                                                                  | L             | P  |        |
| 1  | Kepala                                                                           | 1             | -  | 1      |
| 2  | Sekretariat                                                                      | 7             | 4  | 11     |
| 3  | Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama. | 4             | 1  | 5      |
| 4  | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.                       | 3             | 2  | 5      |
| 5  | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.                              | 6             | 0  | 6      |
|    | Jumlah                                                                           | 21            | 7  | 28     |
|    | Persentase                                                                       | 75            | 25 | 100    |

Dari jumlah pegawai sebanyak 23 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

| No | Uraian                                            | Tingkat Pendidikan |    |    |      |      |    | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|----|----|------|------|----|--------|
|    |                                                   | S2                 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD |        |
| 1  | Kepala                                            | 1                  |    |    |      |      |    | 1      |
| 2  | Sekretariat                                       | 2                  | 3  | 5  | -    | 1    | -  | 11     |
| 3  | Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan | -                  | 4  | -  | 1    | -    | -  | 5      |

| No                | Uraian                                                     | Tingkat Pendidikan |       |       |       |      |    | Jumlah |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|----|--------|
|                   |                                                            | S2                 | S1    | D3    | SLTA  | SLTP | SD |        |
|                   | Ekonomi, Sosial Budaya, Agama                              |                    |       |       |       |      |    |        |
| 4                 | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. | -                  | 4     | -     | 1     | -    | -  | 5      |
| 5                 | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik         | 1                  | 4     | -     | 1     | -    | -  | 6      |
| <b>Jumlah</b>     |                                                            | 4                  | 15    | 5     | 3     | 1    | -  | 28     |
| <b>Persentase</b> |                                                            | 14,29              | 53,57 | 17,86 | 10,71 | 3,57 | 0  | 100    |

**Tabel 2.4**  
**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasar Golongan Tahun 2025**

| No                | Uraian                                                                          | Golongan   |          |         |        | Jumlah |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|--------|--------|
|                   |                                                                                 | Gol VII/IX | Gol I/II | Gol III | Gol IV |        |
| 1                 | Kepala                                                                          |            |          |         | 1      | 1      |
| 2                 | Sekretariat                                                                     | 1          | 3        | 6       | 1      | 11     |
| 3                 | Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama | -          | -        | 5       | -      | 5      |
| 4                 | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.                      | -          | -        | 5       | -      | 5      |
| 5                 | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik                              |            | 1        | 4       | 1      | 6      |
| <b>Jumlah</b>     |                                                                                 | 1          | 4        | 20      | 3      | 28     |
| <b>Persentase</b> |                                                                                 | 3,57       | 14,29    | 71,43   | 10,71  | 100    |

**a. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Aset Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen**

| No. Urut | Nama Barang/ Jenis Barang          | Luas (M <sup>2</sup> ) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat     | Status Tanah |            | Penggunaan | Asal usul | Harga     | Keterangan  |       |
|----------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------|
|          |                                    |                        |                 |                   | Hak          | Sertifikat |            |           |           |             |       |
|          |                                    |                        |                 |                   |              | Tanggal    |            |           |           |             | Nomor |
| 1        | Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan | 439 m <sup>2</sup>     | 1982            | Jalan Arungbinang |              | 1982       | 00187      |           | Pembelian | 269.675.000 |       |
|          |                                    |                        |                 |                   |              |            |            |           |           |             |       |

**Tabel 2.3.**  
**Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen**

| No. Urut | Nama Barang/ Jenis Barang          | Kondisi Bangunan (B, KB, RB) | Luas Lantai (M <sup>2</sup> ) | Letak/ Lokasi Alamat | Luas Bangunan (M <sup>2</sup> ) | Status Tanah | Asal usul | Harga         |
|----------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 1        | Bangunan gedung kantor permanen    | Baik                         | 441 m <sup>2</sup>            | Jalan Arungbinang    | 441 m <sup>2</sup>              |              | Pembelian | 1.474.796.995 |
| 2        | Bangunan gedung instalasi permanen | Baik                         |                               | Jalan Rumah Sakit    | 184 m <sup>2</sup>              |              | Pembelian | 1.679.936.750 |
|          |                                    |                              |                               |                      |                                 |              |           |               |

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

| No | Jenis Barang                 | Keadaan Tahun 2025 |      |             |              |            |              | Kebutuhan |
|----|------------------------------|--------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|    |                              | Total              | Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | Penambahan | Pemeliharaan |           |
| 1  | Transportable Generating Set | 1                  |      |             | 1            |            |              | 1         |
| 2  | Station Wagon(Mobil)         | 4                  | 2    |             | 2            |            |              | 6         |
| 3  | Sepeda Motor                 | 14                 | 13   |             | 1            |            |              | 14        |
| 4  | Lemari Penyimpan             | 7                  | 7    |             |              |            |              | 7         |
| 5  | Lemari Kayu                  | 8                  | 8    |             |              |            |              | 8         |
| 6  | Rak Besi                     | 7                  | 7    |             |              |            |              | 7         |
| 7  | Rak Kayu                     | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 8  | Filing Cabinet Besi          | 16                 | 16   |             |              |            |              | 16        |
| 9  | Lemari Sorok                 | 2                  | 2    |             |              |            |              | 2         |

| No | Jenis Barang                  | Keadaan Tahun 2025 |      |             |              |            |              | Kebutuhan |
|----|-------------------------------|--------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|    |                               | Total              | Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | Penambahan | Pemeliharaan |           |
| 10 | Lemari Kaca                   | 3                  | 3    |             |              |            |              | 3         |
| 11 | White Board                   | 2                  | 2    |             |              |            |              | 2         |
| 12 | LCD Projector/Infocus         | 2                  | 2    |             |              |            |              | 4         |
| 13 | Papan Pengumuman              | 2                  | 2    |             |              |            |              | 2         |
| 14 | Alat Kantor Lainnya Lain-Lain | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 15 | Meja Kerja Kayu               | 13                 | 13   |             |              |            |              | 13        |
| 16 | Bangku Panjang Kayu           | 5                  | 5    |             |              |            |              | 5         |
| 17 | Meja Rapat                    | 14                 | 14   |             |              |            |              | 14        |
| 18 | Meja Telepon                  | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 19 | Meja Resepsionis              | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 20 | Kursi Rapat                   | 62                 | 62   |             |              |            |              | 70        |
| 21 | Kursi Tamu                    | 3                  | 3    |             |              |            |              | 3         |
| 22 | Kursi Biasa                   | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 23 | Meja Komputer                 | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 24 | Sofa                          | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 25 | Lemari Es                     | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 26 | A.C. Split                    | 10                 | 10   |             |              |            |              | 12        |
| 27 | Kipas Angin                   | 4                  | 4    |             |              |            |              | 6         |
| 28 | Televisi                      | 1                  |      |             | 1            |            |              | 2         |
| 29 | Sound System                  | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 30 | Megaphone                     | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 31 | Unit Power Supply             | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 32 | Camera film                   | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 33 | Tustel                        | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 34 | Dispenser                     | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 35 | Meja Kerja Pejabat Eselon II  | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 36 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 6                  | 6    |             |              |            |              | 6         |
| 37 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV  | 7                  | 7    |             |              |            |              | 8         |
| 38 | Meja Tamu Biasa               | 2                  | 2    |             |              |            |              | 3         |
| 39 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |

| No | Jenis Barang                          | Keadaan Tahun 2025 |      |             |              |            |              | Kebutuhan |
|----|---------------------------------------|--------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|    |                                       | Total              | Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | Penambahan | Pemeliharaan |           |
| 40 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III        | 6                  | 6    |             |              |            |              | 6         |
| 41 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV         | 7                  | 7    |             |              |            |              | 8         |
| 42 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 43 | Buffet Kayu                           | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 44 | Audio Monitor Passive                 | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 45 | Microphone/Wireless MIC               | 1                  | 1    |             |              |            |              | 3         |
| 46 | Power Amplifier                       | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 47 | Peralatan Studio Audio Lain-lain      | 4                  | 4    |             |              |            |              | 4         |
| 48 | Layar Film/Projector                  | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 49 | Head Set                              | 2                  | 2    |             |              |            |              | 4         |
| 50 | Handy Talky (HT)                      | 3                  | 3    |             |              |            |              | 3         |
| 51 | Facsimile                             | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 52 | Tripod                                | 2                  | 2    |             |              |            |              | 2         |
| 53 | Exhaust Fan                           | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |
| 54 | P.C Unit                              | 7                  | 7    |             |              |            |              | 8         |
| 55 | Lap Top                               | 13                 | 13   |             |              |            |              | 28        |
| 56 | Note Book                             | 6                  |      |             | 6            |            |              | 6         |
| 57 | Peralatan Mini Komputer Lain-Lain     | 1                  | 1    |             |              |            |              | 1         |
| 58 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 8                  | 7    | 1           |              |            |              | 10        |
| 59 | A.C PORTABLE                          | 1                  | 1    |             |              |            |              | 2         |

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen**

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kebumen memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola bidang politik, ideologi, dan sosial, Bakesbangpol memiliki berbagai layanan yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat, serta mencegah munculnya radikalisasi dan konflik sosial.

Secara umum kinerja pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik dan terus berkembang sesuai dengan dinamika yang ada. Kedepan, Bakesbangpol diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas layanannya dalam merespons berbagai isu yang berkaitan dengan kebangsaan dan politik, guna menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026**

| No | Indikator Perangkat Daerah                                                                                | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah |       |       |       |      |       | Realisasi Capaian |      |      |      |      |      | Persentase Capaian |        |        |      |        |      | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------|--------|--------|------|--------|------|-----|
|    |                                                                                                           |             |            |                          |        | 2021                            | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021               | 2022   | 2023   | 2024 | 2025   | 2026 |     |
|    |                                                                                                           |             |            |                          |        |                                 |       | n-2   | n-1   | n    | n+1   |                   |      | n-2  | n-1  | n    | n+1  |                    |        | n-2    | n-1  | n      | n+1  |     |
| 1  | 2                                                                                                         | 3           | 4          | 5                        | 6      | 7                               | 8     | 9     | 10    | 11   | 12    | 13                | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19                 | 20     | 21     | 22   | 23     | 24   | 25  |
|    | <b>Indikator Tujuan</b>                                                                                   |             |            |                          |        |                                 |       |       |       |      |       |                   |      |      |      |      | -    |                    |        |        |      |        | -    |     |
| a. | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi | -           | -          | -                        | %      | 57,14                           | 60,71 | 64,29 | 71,43 | 75   | 78,57 | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -    | 175                | 164,72 | 155,55 | 140  | 133,33 | -    |     |
|    | <b>Indikator Sasaran</b>                                                                                  |             |            |                          |        |                                 |       |       |       |      |       |                   |      |      |      |      |      |                    |        |        |      |        |      |     |
| a. | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi | -           | -          | -                        | %      | 57,14                           | 60,71 | 64,29 | 71,43 | 75   | 78,57 | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -    | 175                | 164,72 | 155,55 | 140  | 133,33 | -    |     |

**Tabel 2.6**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2025**

| NO   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                  | Satuan                      | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |       |       |       |       |        | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |        |        |        |        |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |        |        |        |        |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          | 2021                                           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2021                         | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 |
| I    | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                      | Jumlah per 100.000 penduduk |            |                          | 150                                            | 24,5  | 41,64 | 55,93 | 87,79 | 133,79 | 150                              | 242,14 | 317,53 | 380,47 | 468,37 | -    | 100                          | 988,35 | 762,56 | 680,26 | 533,51 | -    |
| I.1  | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                                                            | Kegiatan                    |            |                          | 150                                            | 23    | 23    | 23    | 23    | 23     | 150                              | 23     | 23     | 23     | 23     | -    | 100                          | 100    | 100    | 100    | 100    | -    |
| 1    | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                                                          | Dokumen                     |            |                          | 22                                             | 23    | 23    | 23    | 23    | 23     | 22                               | 23     | 23     | 23     | 23     | -    | 100                          | 100    | 100    | 100    | 100    | -    |
| II   | Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum                                                                                                                                                                | %                           |            |                          | 67,59                                          | 67,59 | 67,59 | 69,38 | 69,38 | 69,38  | 71,94                            | 71,94  | 71,94  | 75,85  | 75,85  | -    | 106,44                       | 106,44 | 106,44 | 109,33 | 109,33 | -    |
| II.1 | Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Kegiatan                    |            |                          | 4                                              | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      | 4                                | 4      | 4      | 4      | 4      | -    | 100                          | 100    | 100    | 100    | 100    | -    |

| NO    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Satuan   | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |       |       |      |      |      | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |       |       |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----------------------------------|-------|-------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                          | 2021                                           | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                             | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | orang    |            |                          | 100                                            | 2.970 | 2.250 | 375  | 100  | 100  | 100                              | 2.970 | 2.250 | 375  | 100  | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| III   | Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                     | %        |            |                          | 100                                            | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100                              | 100   | 100   | 100  | 100  | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| III.1 | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                        | Kegiatan |            |                          | 2                                              | 2     | 2     | 2    | 2    | 2    | 2                                | 2     | 2     | 2    | 2    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 1     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                        | orang    |            |                          | 125                                            | 150   | 630   | 150  | 150  | 150  | 125                              | 150   | 630   | 150  | 150  | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |

| NO   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Satuan                      | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |       |       |      |       |        | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |        |        |        |        |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |        |        |        |        |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |                          | 2021                                           | 2022  | 2023  | 2024 | 2025  | 2026   | 2021                             | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2021                         | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 |
| 2    | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah                                               | orang                       |            |                          | 33                                             | 36    | 36    | 36   | 36    | 36     | 33                               | 36     | 36     | 36     | 36     | -    | 100                          | 100    | 100    | 100    | 36     | -    |
| IV   | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan                                                                                                                                                 | Jumlah per 100.000 penduduk |            |                          | 900                                            | 36,71 | 54,64 | 75   | 99,14 | 129,15 | 900                              | 268,06 | 492,43 | 536,05 | 635,20 | -    | 100                          | 730,21 | 901,23 | 714,74 | 640,71 | -    |
| IV.1 | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya                                                                                                     | kegiatan                    |            |                          | 3                                              | 5     | 5     | 5    | 5     | 5      | 3                                | 5      | 5      | 5      | 5      | -    | 100                          | 100    | 100    | 100    | 100    | -    |
| 1    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah | orang                       |            |                          | 50                                             | 3.620 | 3.030 | 200  | 200   | 200    | 50                               | 3.620  | 3.030  | 200    | 200    | -    | 100                          | 100    | 100    | 100    | 100    | -    |

| NO  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                         | Satuan  | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |       |       |       |      |       | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |            |            |      |            |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------|------------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                          | 2021                                           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026  | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                         | 2022       | 2023       | 2024 | 2025       | 2026 |
| 2   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah                                                                 | orang   |            |                          | 400                                            | 400   | 400   | 175   | 175  | 175   | 400                              | 650  | 400  | 175  | 175  | -    | 100                          | 163        | 100        | 100  | 100        | -    |
| V   | Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi                                                                                                                                                                  | Persen  |            |                          | 100                                            | 60,71 | 64,29 | 71,43 | 75   | 78,57 | 100                              | 100  | 100  | 100  | 75   | -    | 100                          | 164,7<br>2 | 155,5<br>5 | 140  | 133,3<br>3 | -    |
| V.1 | Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                          | Dokumen |            |                          | 1                                              | 5     | 5     | 5     | 5    | 5     | 1                                | 5    | 5    | 5    | 5    | -    | 100                          | 100        | 100        | 100  | 100        | -    |
| 1   | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas KelembagaanBidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen |            |                          | -                                              | -     | 4     | 4     | 4    | 4     | -                                | -    | 4    | 4    | 4    | -    | -                            | -          | 100        | 100  | 100        | -    |

| NO | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                  | Satuan  | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                          | 2021                                           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2  | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun                     | Dokumen |            |                          | -                                              | -    | 5    | 5    | 5    | 5    | -                                | -    | 5    | 5    | 5    | -    | -                            | -    | 100  | 100  | 100  | -    |
| 3  | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | orang   |            |                          | 400                                            | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 400                              | 340  | 130  | 130  | 130  | -    | -                            | 261  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 4  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, PemantauanOrang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | orang   |            |                          | -                                              | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | -                                | 130  | 130  | 130  | 130  | -    | -                            | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |

| NO   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Satuan  | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                          | 2021                                           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5    | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan |            |                          | -                                              | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | -                                | 1    | 1    | 1    | 1    | -    | -                            | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 6    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                          | dokumen |            |                          | -                                              | -    | 4    | 4    | 4    | 4    | -                                | -    | 4    | 4    | 4    | -    | -                            | -    | 100  | 100  | 100  | -    |
| VI   | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                    | %       |            |                          | 100                                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100  | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| VI.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | Dokumen |            |                          | 5                                              | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 5                                | 7    | 7    | 7    | 7    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 1    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                               | dokumen |            |                          | 5                                              | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5                                | 5    | 5    | 5    | 5    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 5    | -    |
| 2    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                          | dokumen |            |                          | -                                              | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | -                                | 2    | 2    | 2    | 2    | -    | -                            | 100  | 100  | 100  | 2    | -    |
| VI.2 | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            | Bulan   |            |                          | 12                                             | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12                               | 12   | 12   | 12   | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |

| NO   | Indikator Kinerja                                                                  | Satuan      | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |        |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------|------|
|      |                                                                                    |             |            |                          | 2021                                           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025   | 2026 |
|      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | orang/bulan |            |                          | 15                                             | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 15                               | 23   | 23   | 23   | 28   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 121,74 | -    |
|      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | dokumen     |            |                          | 1                                              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 1                                | 4    | 4    | 4    | 4    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100    | -    |
| VI.3 | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                          | orang       |            |                          | -                                              | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | -                                | 22   | 23   | -    | -    | -    | -                            | 92   | 100  | 0    | 0      | -    |
| 1    | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                          | orang       |            |                          | -                                              | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | -                                | 22   | 23   | -    | -    | -    | -                            | 92   | 100  | 0    | 0      | -    |
| VI.4 | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | bulan       |            |                          | 12                                             | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12                               | 12   | 12   | 12   | -    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | -      | -    |
| 1    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket       |            |                          | 1                                              | 1    | 1    | 1    | 4    | 4    | 1                                | 1    | 1    | 1    | 4    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100    | -    |
| 2    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | paket       |            |                          | 1                                              | 1    | 1    | 1    | 12   | 1    | 1                                | 1    | 1    | 1    | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100    | -    |
| 3    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | paket       |            |                          | 1                                              | 1    | 1    | 1    | 12   | 1    | 1                                | 1    | 1    | 1    | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100    | -    |
| 4    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | dokumen     |            |                          | 1                                              | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1                                | 2    | 2    | 2    | 2    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100    | -    |

| NO   | Indikator Kinerja                                                                      | Satuan  | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                        |         |            |                          | 2021                                           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | paket   |            |                          | 1                                              | 1    | 1    | 1    | 12   | 1    | 1                                | 1    | 1    | 1    | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 6    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | laporan |            |                          | 1                                              | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 1                                | 12   | 12   | 12   | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 7    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | dokumen |            |                          | -                                              | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | -                                | 12   | 12   | 12   | 12   | -    | -                            | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| VI.5 | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | unit    |            |                          | -                                              | 1    | 37   | 2    | 7    | 7    | -                                | 1    | 37   | 2    | 7    | -    | -                            | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 1    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |         |            |                          | -                                              | 1    | 37   | 2    | 7    | 7    | -                                | -    | 37   | 2    | 7    | -    | -                            | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| VI.6 | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | bulan   |            |                          | 12                                             | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12                               | 12   | 12   | 12   | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 1    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | laporan |            |                          | 1                                              | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 1                                | 12   | 12   | 12   | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 2    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan |            |                          | 1                                              | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 1                                | 12   | 12   | 12   | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |

| NO   | Indikator Kinerja                                                                                      | Satuan  | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|      |                                                                                                        |         |            |                          | 2021                                           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | laporan |            |                          | 1                                              | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 1                                | 12   | 12   | 12   | 12   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| VI.7 | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | unit    |            |                          | 3                                              | 15   | 54   | 54   | 54   | 54   | 3                                | 12   | 54   | 43   | 35   | -    | 100                          | 80   | 100  | 80   | 100  | -    |
| 1    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit    |            |                          | 1                                              | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 1                                | 7    | 7    | 7    | 7    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 2    | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | unit    |            |                          | -                                              | -    | 25   | 12   | 12   | 25   | -                                | -    | 25   | 12   | 12   | -    | -                            | -    | 100  | 100  | 100  | -    |
| 3    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | unit    |            |                          | 1                                              | 7    | 21   | 18   | 15   | 21   | 1                                | 7    | 21   | 18   | 15   | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 4    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              | unit    |            |                          | 1                                              | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                                | 1    | 1    | 1    | 1    | -    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |

#### **2.1.4. Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen merupakan aspek krusial dalam mendukung program-program strategis di bidang kesatuan, kebangsaan, dan stabilitas politik daerah. Setiap tahun, anggaran dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti peningkatan kesadaran bela negara, penguatan wawasan kebangsaan, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, pendidikan politik, serta peningkatan kewaspadaan dini daerah. Penggunaan anggaran ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, serta menjaga stabilitas dan ketahanan nasional di tingkat daerah. Dalam penyusunannya, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

Realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen setiap tahunnya dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Laporan realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tantangan dalam realisasi pendanaan dapat mencakup berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, serta dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan anggaran menjadi hal yang sangat penting agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung stabilitas politik di Kabupaten Kebumen.

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025**

| No. | Program/ Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021                  |           |         | 2022                  |           |         | 2023                  |            |         | 2024                  |            |         | 2025                  |           |         | Rata-rata<br>Pertumbuhan |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi | Capaian | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi | Capaian | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi  | Capaian | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi  | Capaian | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi | Capaian | Anggaran<br>Perubahan    | Realisasi |
| I   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                              | 483.247               | 338.310   | 70,00   | 333.247               | 319.250   | 95,80   | 415.000               | 410.838    | 99,00   | 568.417               | 568.319    | 99,98   | 531.853               | 523.303   | 98,39   | 6%                       | 0,53      |
| 1   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                   | 483.247               | 338.310   | 70,00   | 333.247               | 319.250   | 95,80   | 415.000               | 410,838    | 99,00   | 568.417               | 568.319    | 99,98   | 531.853               | 523.303   | 98,39   | 6%                       | 0,53      |
| II  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                    | 2.170.989             | 2.167.986 | 99,86   | 3.562.889             | 3.540.295 | 99,37   | 25.692.385            | 25.562.296 | 99,49   | 39.263.803            | 39.072.218 | 99,51   | 4.236.436             | 4.149.110 | 97,94   | 162%                     | 6,49      |
| 1   | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 2.170.989             | 2.167.986 | 99,86   | 3.562.889             | 3.540.295 | 99,37   | 25.692.385            | 25.562.296 | 99,49   | 39.263.803            | 39.072.218 | 99,51   | 4.236.436             | 4.149.110 | 97,94   | 162%                     | 6,49      |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                             | 70.739                | 67.902    | 95,99   | 37.764                | 37.451    | 99,18   | 237.341               | 236.985    | 99,84   | 76.108                | 75.885     | 99,71   | 49.974                | 48.781    | 97,61   | 95%                      | 3,84      |
|     | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                               | 70.739                | 67.902    | 95,99   | 37.764                | 37.451    | 99,18   | 237.341               | 236.985    | 99,84   | 76.108                | 75.885     | 99,71   | 49.974                | 48.781    | 97,61   | 95%                      | 3,84      |
| IV  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                                  | 264.041               | 241.114   | 91,32   | 1.645.941             | 1.615.014 | 98,12   | 1.722.842             | 1.713.797  | 99,48   | 159.908               | 152.823    | 95,57   | 498.383               | 637.534   | 98,40   | 162%                     | 8,02      |
|     | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                | 264.041               | 241.114   | 91,32   | 1.645.941             | 1.615.014 | 98,12   | 1.722.842             | 1.713.797  | 99,48   | 159.908               | 152.823    | 95,57   | 498.383               | 637.534   | 98,40   | 162%                     | 8,02      |

| No. | Program/ Kegiatan                                                                                                 | 2021                  |           |         | 2022                  |           |         | 2023                  |           |         | 2024                  |           |         | 2025                  |           |         | Rata-rata<br>Pertumbuhan |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                   | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi | Capaian | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi | Capaian | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi | Capaian | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi | Capaian | Anggaran<br>Perubahan | Realisasi | Capaian | Anggaran<br>Perubahan    | Realisasi |
| V   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL        | 229.679               | 229.626   | 99,98   | 212.099               | 207.421   | 97,79   | 1.321.847             | 1.300.335 | 98,37   | 2.706.422             | 1.553.809 | 57,41   | 1.406.701             | 1.361.137 | 96,76   | 143%                     | 5,24      |
|     | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 229.679               | 229.626   | 99,98   | 212.099               | 207.421   | 97,79   | 1.321.847             | 1.300.335 | 98,37   | 2.706.422             | 1.553.809 | 57,41   | 1.406.701             | 1.361.137 | 96,76   | 143%                     | 5,24      |
| VI  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                                                      | 2.722.947             | 2.573.888 | 94,53   | 3.390.444             | 3.193.000 | 94,18   | 3.591.242             | 3.459.101 | 96,32   | 3.500.835             | 3.338.367 | 95,36   | 4.125.220             | 3.592.191 | 87,08   | 11%                      | 0,37      |
| 1   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | 13.771                | 11.474    | 83,32   | 15.701                | 15.007    | 95,59   | 15.845                | 15.599    | 98,45   | 6.972                 | 6.971     | 99,99   | 18.177                | 17.325    | 95,31   | 26%                      | 1,28      |
| 2   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                   | 2.468.613             | 2.326.637 | 94,25   | 3.038.318             | 2.848.654 | 93,75   | 3.068.415             | 2.940.434 | 95,83   | 3.177.391             | 3.021.669 | 95,10   | 3.777.767             | 3.264.050 | 86,40   | 12%                      | 0,36      |
| 3   | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                | -                     | -         | -       | 30.000                | 29.453    | 98,18   | 25.900                | 25.561    | 98,69   | -                     | -         | -       | -                     | 0         | 0       | -3%                      | 0,13      |
| 4   | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | 92.814                | 92.354    | 99,50   | 94.609                | 90.932    | 96,11   | 113.939               | 113.511   | 99,62   | 90.713                | 90.112    | 99,34   | 58.517                | 57.174    | 97,70   | -8%                      | 983,28    |
| 5   | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         | -                     | -         | -       | 17.794                | 17.460    | 98,12   | 160.835               | 160.311   | 99,67   | 25.300                | 25.175    | 99,51   | 14.965                | 12.923    | 86,35   | 170%                     | 6,85      |
| 6   | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | 61.712                | 60.688    | 98,34   | 84.656                | 83.785    | 98,97   | 96.912                | 94.617    | 97,63   | 116.760               | 110.958   | 95,03   | 119.093               | 104.367   | 87,86   | 19%                      | 0,62      |
| 7   | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 86.037                | 82.734    | 96,16   | 109.366               | 107.807   | 98,57   | 109.396               | 109.065   | 99,70   | 83.699                | 83.480    | 99,74   | 136.699               | 136.081   | 99,55   | 17%                      | 0,71      |

### 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pihak-pihak yang menjadi fokus dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Penetapan kelompok sasaran ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen. Adapun kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol meliputi:

1. **Lembaga Pendidikan** (SMP, SMA, Perguruan Tinggi), sebagai kelompok sasaran penting dalam pembinaan karakter bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
2. **Partai politik**, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat serta mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berintegritas.
3. **Organisasi kemasyarakatan (Ormas)**, sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusivitas daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**, sebagai mitra pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap kebijakan publik.
5. **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**, merupakan wadah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
6. **Dinas/Instansi Vertikal**, Dinas dan instansi vertikal merupakan mitra koordinatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol.
7. **Masyarakat umum**, memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa melalui berbagai upaya yang dilakukan diantaranya : pendidikan politik, penguatan ideologi Pancasila serta pencegahan konflik sosial, sehingga menjadi pelaku aktif dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai dan demokratis.

## **2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah**

#### **A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah**

Isu strategis adalah permasalahan utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan organisasi dan perlu mendapat perhatian khusus karena sifatnya yang mendesak, berdampak luas, serta berpotensi memengaruhi arah kebijakan di masa depan

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu daerah yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

Dari rumusan permasalahan, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen diantaranya dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum, maka dirumuskan permasalahan Pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu : “Meningkatnya potensi konflik sosial”. Permasalahan dan akar permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Rumusan Permasalahan**

| No | Pokok Masalah                       | Permasalahan                                                                                                           | Akar Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya potensi konflik sosial | Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan daerah. | Kurangnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya stabilitas, serta lemahnya pengawasan dan mitigasi dini terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik atau gangguan keamanan. |
| 2  |                                     | Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi.                                           | Kurangnya literasi digital dan kemampuan kritis dalam menyaring informasi, serta dominasi teknologi yang mengubah pola interaksi sosial menjadi lebih individualistik dan rentan terhadap pengaruh negatif seperti hoaks dan budaya konsumtif.          |
| 3  |                                     | Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.                                                                            | Rendahnya edukasi tentang bahaya narkoba, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, tekanan sosial dan ekonomi yang memicu kerentanan individu, serta keberadaan jaringan distribusi yang terorganisir dan sulit diberantas.                             |
| 4  |                                     | Melemahnya pemahaman dan implementasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.                                       | Kurangnya pendidikan yang sistematis dan relevan tentang nilai-nilai Pancasila, adanya pengaruh globalisasi dan informasi yang tidak terkendali yang menggeser kesadaran akan identitas dan persatuan nasional.                                         |
| 5  |                                     | Tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah.                                                                   | Minimnya edukasi politik yang inklusif, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap                                                                                                                                                                       |

| No | Pokok Masalah | Permasalahan | Akar Permasalahan                                                                                                                           |
|----|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |              | lembaga politik, serta kurangnya akses dan motivasi untuk terlibat dalam proses demokrasi akibat ketimpangan informasi dan apatisme sosial. |

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka permasalahan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
  - a. Ancaman terhadap ideologi Pancasila akibat pengaruh globalisasi, liberalisme, dan individualisme yang dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.
  - b. Meningkatnya paham radikal dan intoleransi yang bertentangan dengan Pancasila.
  - c. Masih maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
  - d. Masuknya budaya asing akibat arus globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada perilaku dan budaya di masyarakat.
  - e. Masalah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang dapat memicu ketidakstabilan yang dapat memicu konflik sosial.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
  - a. Polarisasi politik pasca pemilu atau pilkada dapat memicu perpecahan di masyarakat.
  - b. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
  - c. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
  - d. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik melalui media sosial yang memperuncing perbedaan pandangan dalam berpolitik.

- e. Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi aturan atau menyimpang dari tujuan awal.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- a. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
  - b. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat memicu ketidakstabilan dan konflik horizontal.
  - c. Adanya potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memecah belah persatuan nasional
  - d. Meningkatnya serangan siber (*cybercrime*) seperti peretasan, pencurian data, dan disinformasi yang mengancam keamanan nasional.

## B. TELAAH

### 1. Telaah Kebijakan Nasional

Dalam menyusun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Adapun penugasan kinerja Kementerian Dalam Negeri dengan indikator sebagai berikut :

1. Menjaga kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional.
2. Menjadi Bangsa Mandiri dalam memenuhi kebutuhan Air.
3. Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.
4. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
6. Menerapkan keadilan hukum dan sistem anti korupsi.
7. Memperbaiki kinerja birokrasi.

8. Mencapai peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi.

Berkaitan dengan 8 indikator tersebut di atas, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki korelasi dalam mendukung tujuan penugasan Kementerian Dalam Negeri yaitu Menjaga kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional di tingkat daerah.

## 2. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/42 Tentang Pedoman Renstra dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra disebutkan bahwa Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- dan 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Berdasarkan pada sasaran diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian sasaran ke empat yaitu terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis, dimana tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan kesatuan bangsa dan politik dengan indikator Indeks Ketahanan Ipoleksosbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam kerangka tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen telah sejalan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

## 3. Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen merupakan instrumen penting dalam mengatur pemanfaatan ruang secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam

implementasinya, RTRW tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik pembangunan, tetapi juga membawa implikasi terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan daerah. Perubahan fungsi lahan, pertumbuhan kawasan industri, urbanisasi, hingga pengembangan kawasan strategis dapat memicu munculnya potensi konflik sosial, pergeseran demografi, serta kerentanan dalam kerukunan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik serta ketahanan nasional di tingkat daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan kerukunan, pencegahan konflik, dan deteksi dini gangguan keamanan, Bakesbangpol berperan penting dalam mengantisipasi dampak sosial-politik dari pelaksanaan RTRW. Melalui koordinasi lintas sektor, pembinaan organisasi kemasyarakatan, penguatan forum-forum kewaspadaan dini, serta pembentukan jejaring deteksi dini, Bakesbangpol dapat membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberhasilan pembangunan ruang wilayah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tujuan RTRW. Sinergi antara perencanaan tata ruang dan pengelolaan dinamika sosial-politik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang aman, harmonis, dan berkelanjutan.

#### 4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2025-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-RPJMD Kabupaten Kebumen memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. KLHS-RPJMD berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. KLHS-RPJMD mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan, serta memberikan rekomendasi mitigasi dan pengelolaan risiko lingkungan. Dengan demikian, KLHS-RPJMD memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Tabel 2.9  
Tema Isu KLHS Kabupaten Kebumen

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kebumen untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

| TEMA ISU             | ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kondusifitas Wilayah | Meningkatkan peran Pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan mitigasi ekstrimisme, terorisme dan radikalisme untuk mewujudkan kondusifitas wilayah.                                             |
| Toleransi            | Meningkatkan edukasi tentang wawasan kebangsaan, keberagaman, toleransi, bahaya narkoba dan pemberdayaan ormas.                                                                                                                                     |
| Demokrasi            | Meningkatkan demokratisasi dengan penguatan partisipasi pemilih, partisipasi politik dan kesadaran hak kewarganegaraan serta membangun kemitraan strategis dalam rangka penguatan pilar demokrasi dan partisipasi politik perempuan di Jawa Tengah. |

5. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu **Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya.**

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang,

papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, didukung dengan 5 Misi yaitu :

1. **MISI 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

2. **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

3. **MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

4. **MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi public berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. **MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya local Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Bupati dan Wakil Bupati kebumen dalam mencapai Misi ke-5 yaitu ***“Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal”***, melalui : pembinaan kerukunan umat beragama, penguatan wawasan

kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, pemberdayaan dan pembinaan ormas, pendidikan politik kepada masyarakat, deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial.

Berikut adalah peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi desa, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

2.2.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis perangkat daerah adalah permasalahan, tantangan, atau peluang yang bersifat mendasar dan berdampak luas terhadap kinerja, peran, dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang memerlukan penanganan prioritas, kebijakan yang tepat, serta langkah-langkah terencana dan terintegrasi karena berpotensi memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pencapaian sasaran strategis daerah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 2.10

## Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD (Perangkat Daerah)

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERMASALAHAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISU STRATEGIS PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GLOBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberagaman sosial, budaya, dan agama sebagai modal persatuan masyarakat</li> <li>- Tingginya jumlah penduduk usia produktif dan partisipasi politik masyarakat</li> <li>- Keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM)</li> <li>- Forum kerukunan (FKUB, FPK) dan kearifan lokal dalam menjaga toleransi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terdapat potensi konflik sosial berlatar SARA dan kepentingan kelompok</li> <li>- Literasi politik dan kesadaran demokrasi masyarakat masih rendah</li> <li>- Pendataan dan pembinaan Ormas belum optimal</li> <li>- Intensitas dialog lintas agama dan kelompok sosial masih terbatas</li> <li>- Keterbatasan kapasitas SDM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial</li> <li>- Tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan partisipatif</li> <li>- Penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan</li> <li>- Penguatan harmoni sosial dalam pembangunan berkelanjutan</li> <li>- Penguatan ketahanan sosial dalam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya konflik identitas dan intoleransi di berbagai Negara</li> <li>- Menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi global</li> <li>- Meningkatnya peran <i>NGO</i> dan <i>civil society global</i></li> <li>- Gelombang ekstremisme dan adikalisme global</li> <li>- Ancaman keamanan non-militer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan persatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika</li> <li>- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu</li> <li>- Penataan dan pengawasan Ormas secara nasional</li> <li>- Program penguatan moderasi beragama</li> <li>- Penguatan stabilitas keamanan nasional</li> <li>- Kebijakan nasional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinamika hubungan sosial antarwilayah yang berpotensi memicu gesekan</li> <li>- Dinamika politik lokal menjelang dan pasca pemilu</li> <li>- Aktivitas Ormas lintas wilayah</li> <li>- Kerawanan hubungan sosial antar komunitas lokal</li> <li>- Potensi kerawanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial berbasis masyarakat</li> <li>- Peningkatan pendidikan politik dan penguatan budaya demokrasi</li> <li>- Pembinaan, dan pengawasan Ormas secara terpadu</li> <li>- Penguatan peran FKUB dan program moderasi beragama</li> <li>- Penguatan sistem</li> </ul> |

| POTENSI DAERAH<br>YANG MENJADI<br>KEWENANGAN PD                                                                                                                                                                                                | PERMASALAHAN<br>PD                                                                                                                                                                                                                                 | ISU KLHS YANG<br>RELEVAN DENGAN<br>PD                                                                                                                                                                                                                | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN<br>PD                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | ISU STRATEGIS<br>PD                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | GLOBAL                                                                                                                                                                                 | NASIONAL                                                                                                                       | REGIONAL                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jejaring kewaspadaan dini daerah dan koordinasi dengan instansi vertikal</li> <li>- Mobilitas orang asing dan potensi investasi asing</li> <li>- Bonus demografi dan potensi generasi muda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dan sarana pendukung deteksi dini</li> <li>- Pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing belum maksimal</li> <li>- Menurunnya ketertarikan generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan berkelanjutan</li> <li>- Pengelolaan dampak sosial mobilitas penduduk dalam pembangunan berkelanjutan</li> <li>- Pelestarian nilai sosial dan budaya dalam pembangunan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- global (radikalisme, terorisme)</li> <li>- Arus migrasi dan mobilitas penduduk global</li> <li>- Globalisasi budaya dan gaya hidup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengawasan orang asing</li> <li>- Penguatan pendidikan karakter kebangsaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- konflik sosial antarwilayah</li> <li>- Pergerakan orang asing antarwilayah</li> <li>- Perubahan gaya hidup masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kewaspadaan dini daerah</li> <li>- Penguatan koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing</li> <li>- Revitalisasi wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dan Penguatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</li> </ul> |

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dari perumusan perencanaan yang sistematis, terarah, dan terukur dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan dan sasaran berorientasi pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta memperkuat peran strategis OPD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan akuntabel.

Tujuan adalah rumusan umum mengenai hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah, yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas strategis organisasi perangkat daerah. Tujuan juga merupakan bentuk operasionalisasi dari misi Kepala Daerah, yang dijabarkan dalam pernyataan yang lebih konkret, dapat diukur, dan realistis. Melalui tujuan yang jelas, perangkat daerah memiliki arah pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan sasaran, program, dan kegiatan selama periode perencanaan lima tahunan.

Sementara itu, sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, berupa hasil yang lebih terukur dan terperinci yang hendak dicapai dalam kurun waktu perencanaan Renstra. Sasaran berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), penentuan program dan kegiatan, serta perumusan target kinerja tahunan dan lima tahunan. Sasaran juga menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah serta alat untuk mengukur pencapaian pembangunan daerah secara lebih objektif.

Dengan merumuskan tujuan dan sasaran secara terukur dan terarah, Bakesbangpol Kabupaten Kebumen diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjaga keutuhan wilayah, meningkatkan toleransi sosial, serta mewujudkan kondisi daerah yang aman dan kondusif guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kebumen disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

## Sasaran dan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

| No. | NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan                              | Tujuan                                  | Sasaran                                                              | Indikator Tujuan/Sasaran                                                                                     | Target Tahun |      |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |                                                                  |                                         |                                                                      |                                                                                                              | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.  | Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan | Meningkatkan stabilitas keamanan daerah |                                                                      | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikalisme dan Sumber Daya Ekonomi | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2.  |                                                                  |                                         | Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini | Jumlah Kejadian Konflik SARA                                                                                 | 5            | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    |

Tujuan yang ditetapkan Bakesbangpol dalam periode perencanaan pembangunan tahun 2025–2029 adalah "*Meningkatkan stabilitas keamanan daerah.*" Tujuan ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah, mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Stabilitas keamanan daerah menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran Bakesbangpol sangat penting dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial politik dan ekonomi, membangun jejaring komunikasi yang efektif dengan unsur masyarakat, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah "*Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi.*" Indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya melalui Bakesbangpol, dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk konflik yang berpotensi menimbulkan instabilitas.

Dengan indikator ini, pemerintah daerah dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan, seperti fasilitasi mediasi konflik, peningkatan peran forum-forum kewaspadaan dini, pembinaan terhadap organisasi masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi di tengah masyarakat. Semakin tinggi persentase penanganan konflik yang berhasil diselesaikan, maka semakin baik pula pencapaian tujuan peningkatan stabilitas keamanan daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, salah satu sasaran yang ditetapkan oleh Bakesbangpol adalah "*Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini.*" Sasaran ini menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons secara cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Kewaspadaan dini menjadi komponen penting dalam sistem keamanan daerah, karena melalui fungsi deteksi dan pencegahan dini, pemerintah daerah dapat meminimalisir dampak konflik, bahkan mencegah terjadinya konflik sejak dari akar penyebabnya. Kegiatan-kegiatan seperti penguatan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pelatihan deteksi dini bagi aparaturnya dan masyarakat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor, menjadi bentuk konkret implementasi sasaran ini.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah *“Jumlah kejadian konflik SARA.”* Indikator ini bersifat kuantitatif dan mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dinamika sosial masyarakat yang bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Semakin sedikit jumlah kejadian konflik SARA yang terjadi, maka semakin efektif pula peran kewaspadaan dini yang dijalankan oleh daerah.

Melalui indikator ini, Bakesbangpol dapat secara berkala mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan konflik SARA, menganalisis penyebab dan wilayah rawan, serta melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Penurunan jumlah konflik juga menjadi cerminan meningkatnya kesadaran dan toleransi masyarakat, serta membaiknya hubungan antar kelompok sosial, budaya, agama, dan politik di daerah.

**3.2. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Strategi Perangkat Daerah merupakan cara dan pendekatan yang ditetapkan oleh perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                              | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                             | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                              | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>- Penyusunan peta rawan konflik dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat</div> <div>- Penyusunan modul pendidikan politik</div> | <div>- Peningkatan kapasitas kader deteksi dini tingkat kecamatan</div> <div>- Sosialisasi pendidikan politik ke sekolah dan masyarakat</div> <div>- Pembinaan kapasitas</div> | <div>- Implementasi sistem peringatan dini berbasis komunitas</div> <div>- Pengembangan media edukasi demokrasi</div> <div>- Monitoring dan evaluasi terpadu</div> | <div>- Integrasi data potensi konflik dengan sistem kewaspadaan daerah</div> <div>- Penguatan forum-forum</div> | <div>- Pemantapan model pencegahan konflik berbasis masyarakat</div> <div>- Internalisasi budaya demokrasi secara berkelanjutan</div> |

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                    | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                 | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                  | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan dan validasi database Ormas</li> <li>- Penguatan kelembagaan FKUB</li> <li>- Penyusunan basis data orang/lembaga asing</li> <li>- Penyusunan materi wawasan kebangsaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengurus Ormas</li> <li>- Dialog lintas umat beragama secara rutin</li> <li>- Penguatan koordinasi dengan instansi vertikal terkait</li> <li>- Sosialisasi nilai-nilai Pancasila</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan Ormas</li> <li>- Pengembangan program moderasi beragama di masyarakat</li> <li>- Pelaksanaan pengawasan terpadu</li> <li>- Pengembangan kader bela negara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>partisipasi publik</li> <li>- Penguatan sistem pelaporan dan pengawasan</li> <li>- Penguatan peran FKUB dalam resolusi konflik sosial</li> <li>- Pengembangan sistem pelaporan terpadu</li> <li>- Sosialisasi program ke sekolah dan masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantapan tata kelola Ormas yang tertib dan transparan</li> <li>- Pemantapan FKUB sebagai pusat harmoni sosial</li> <li>- Pemantapan mekanisme pengawasan berkelanjutan</li> <li>- Pemantapan budaya berbangsa dan bernegara</li> </ul> |

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman strategis yang berisi garis besar langkah-langkah yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

| NO | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN<br>RENSTRA PD                                                                      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Peningkatan koordinasi antarinstansi keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah         | - Penguatan koordinasi antar instansi pemerintah daerah, TNI/Polri, dan instansi vertikal lainnya |     |
|    |                                                                                                                                                          | - Pengembangan sistem deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi konflik sosial, kriminalitas, dan gangguan ketertiban umum | - Penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pemantauan isu strategis di masyarakat. |     |

| NO | OPERASIONALISASI<br>NSPK | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD                                                                                                                                                                          | ARAH KEBIJAKAN<br>RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KET |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan manajemen konflik berbasis kearifan lokal bagi tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelibatan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pencegahan konflik</li> <li>- Menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, dan kelompok rentan.</li> <li>- Membangun kemitraan dengan parpol dan ormas untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang berkelanjutan.</li> </ul>                                                         |     |
|    |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perwujudan forum dialog lintas agama, etnis, dan budaya secara rutin untuk memelihara harmoni sosial dan mencegah konflik horizontal.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kelembagaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam mencegah terjadinya konflik SARA.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|    |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi kegiatan sosialisasi hukum, peraturan daerah, dan nilai-nilai toleransi untuk memperkuat kesadaran hukum dan kerukunan antarwarga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan secara berkelanjutan di sekolah dan masyarakat.</li> <li>- Menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum</li> <li>- Pembentukan dan penguatan kader/ relawan anti-narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat melalui DUPAN (Duta Pelajar Anti Narkoba).</li> </ul> |     |

BAB IV

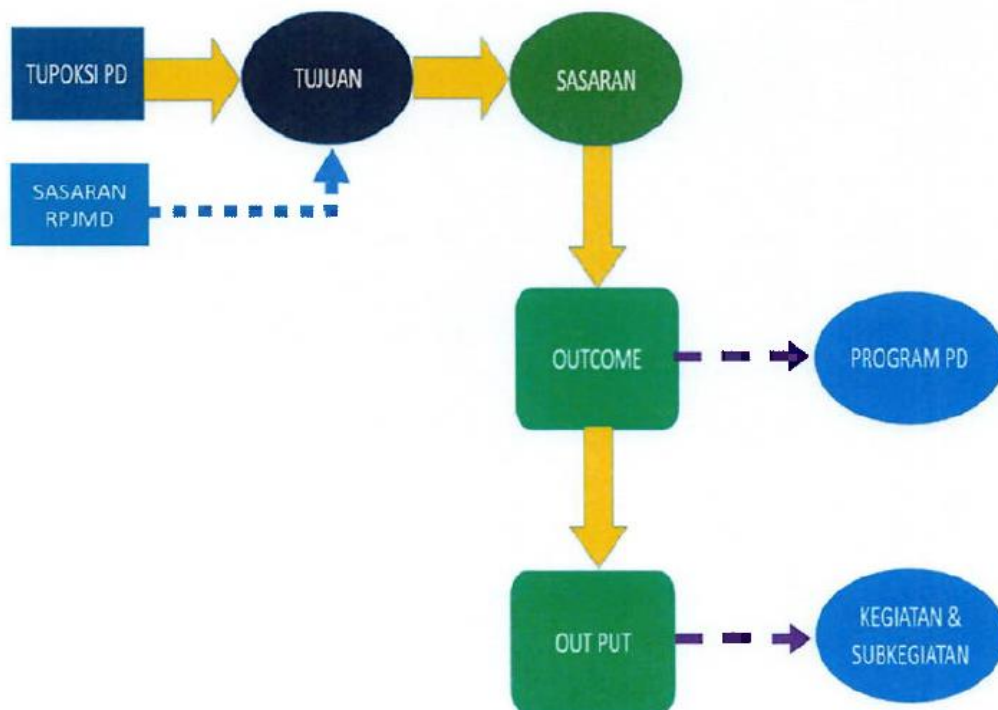
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program dan Kegiatan

A. Rencana Program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana gambar 4.1

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Perangkat Daerah



Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No | Program/Kegiatan                                                  | Subkegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;<br>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.                           | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>5. Penyediaan Bahan/Material<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| 5  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. | 1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                    |

| No       | Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subkegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah.                                                                                                                                                                                                            | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Pemeliharaan Mebel<br>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                    |
| <b>B</b> | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.                                                                                                                                                                         | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>C</b> | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. | 1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                                                                                                                                   |
| <b>D</b> | <b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                               | 1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                | 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah<br>2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| <b>F</b> | <b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No | Program/Kegiatan                                                                                         | Subkegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> |

Secara lengkap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Program Perangkat Daerah

| BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                    | BASELINE<br>2024 | Target<br>2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |                |        |                |        |               | PD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                         |                  |                | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |               |                                   |
|                                                                                           |                                                                                                                         |                  |                | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          |                                   |
| (1)                                                                                       | (2)                                                                                                                     | (3)              |                | (4)                             | (5)           | (6)    | (7)           | (8)    | (9)            | (10)   | (11)           | (12)   | (13)          | (14)                              |
| 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                          |                                                                                                                         |                  |                |                                 |               |        |               |        |                |        |                |        |               |                                   |
| 8.01.01-<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH<br>KABUPATEN/<br>KOTA  |                                                                                                                         |                  |                |                                 | 4.342.997.209 |        | 4.475.004.000 |        | 4.609.526.289  |        | 4.757.117.945  |        | 4.860.017.492 | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>pelaksanaan kinerja<br>perangkat daerah                       | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Perangkat Daerah<br>(Dengan Satuan<br>Indeks)                                    | 89,51            | 90,30          | 90,40                           |               | 90,45  |               | 90,50  |                | 90,55  |                | 90,60  |               | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>pelaksanaan kinerja<br>perangkat daerah                       | Nilai SAKIP<br>Perangkat Daerah<br>(Dengan Satuan<br>Nilai)                                                             | 71,40            | 72,75          | 72,90                           |               | 73,00  |               | 73,20  |                | 73,76  |                | 75,00  |               | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8.01.02-<br>PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN   |                                                                                                                         |                  |                |                                 | 504.000.000   |        | 515.000.000   |        | 516.000.000    |        | 521.000.000    |        | 541.000.000   | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| Meningkatnya<br>pemahaman<br>terhadap ideologi<br>Pancasila dan<br>karakter<br>kebangsaan | Persentase<br>pemahaman<br>terhadap<br>ideologi<br>Pancasila dan<br>karakter<br>kebangsaan<br>(Dengan Satuan<br>Persen) | 73               | 75             | 77                              |               | 79     |               | 81     |                | 83     |                | 85     |               | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8.01.03-<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PERAN<br>PARTAI POLITIK<br>DAN                      |                                                                                                                         |                  |                |                                 | 3.780.480.000 |        | 3.786.480.000 |        | 27.790.480.000 |        | 49.835.480.000 |        | 3.800.480.000 | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |

| BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                                 | BASELINE<br>2024 | Target<br>2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                             |
| LEMBAGA<br>PENDIDIKAN<br>MELALUI<br>PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN<br>ETIKA SERTA<br>BUDAYA<br>POLITIK                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                             |
| Meningkatnya Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan Persen) | 73               | 75             | 77                              |            | 79     |            | 81     |            | 83     |            | 85     |            | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.04 -<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                 | 67.000.000 |        | 72.000.000 |        | 73.000.000 |        | 75.000.000 |        | 85.000.000 | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                       | Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan Persen)                                                                                                                                                                                        | 72               | 72             | 74                              |            | 78     |            | 82     |            | 86     |            | 90     |            | Kesatuan Bangsa dan Politik |

| BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM                                                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                   | BASELINE<br>2024 | Target<br>2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PD<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                  |                | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                   |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                  |                | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                   |
| 8.01.05-<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>KETAHANAN<br>EKONOMI,<br>SOSIAL, DAN<br>BUDAYA                                         |                                                                                                                        |                  |                |                                 | 207.047.000 |        | 171.047.000 |        | 172.547.000 |        | 178.547.000 |        | 193.547.000 | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                                                                | Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Dengan Satuan Persen)                   | 73               | 75             | 77                              |             | 79     |             | 81     |             | 83     |             | 85     |             | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8.01.06-<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK SOSIAL |                                                                                                                        |                  |                |                                 | 415.000.000 |        | 504.000.000 |        | 509.000.000 |        | 561.600.000 |        | 597.800.000 | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen                                              | Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (Dengan Satuan Persen) | 100              | 100            | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |

**Tabel 4.3**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>                       | <b>Tujuan</b>                           | <b>Sasaran</b>                                                       | <b>Outcome</b>                                             | <b>Output</b> | <b>Indikator</b>                                                                                             | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                    | <b>Ket</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan | Meningkatkan stabilitas keamanan daerah |                                                                      |                                                            |               | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikalisme dan Sumber Daya Ekonomi |                                              |            |
|                                                                  |                                         | Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini |                                                            |               | Jumlah Kejadian Konflik SARA                                                                                 |                                              |            |
|                                                                  |                                         |                                                                      | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah |               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |            |
|                                                                  |                                         |                                                                      | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja                  |               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                 |                                              |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b>   | <b>Output</b>                                                                        | <b>Indikator</b>                                                 | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                 | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                | Perangkat Daerah |                                                                                      |                                                                  |                                                                           |            |
|                                            |               |                |                  | Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                            |               |                |                  |                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              |            |
|                                            |               |                |                  |                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |            |
|                                            |               |                |                  | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |            |
|                                            |               |                |                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            |            |
|                                            |               |                |                  |                                                                                      | Jumlah Dokumen                                                   | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan                                |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b>                                           | <b>Indikator</b>                                                                    | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                      | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                |                                                         | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                             |            |
|                                            |               |                |                | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya                                              | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |            |
|                                            |               |                |                |                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |            |
|                                            |               |                |                | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                            |               |                |                |                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan  | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |            |
|                                            |               |                |                |                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b>                                         | <b>Indikator</b>                                                             | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                 | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                |                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      |            |
|                                            |               |                |                |                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     |            |
|                                            |               |                |                |                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material                                    |            |
|                                            |               |                |                |                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         |            |
|                                            |               |                |                |                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                        |            |
|                                            |               |                |                | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah                                    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b>                                                      | <b>Indikator</b>                                                                       | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                            | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                | Urusan Pemerintah Daerah                                           |                                                                                        |                                                                      |            |
|                                            |               |                |                |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   |            |
|                                            |               |                |                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                             | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |            |
|                                            |               |                |                |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          |            |
|                                            |               |                |                |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |            |
|                                            |               |                |                |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |            |
|                                            |               |                |                | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik                            | Jumlah unit Pemeliharaan                                                               | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                            |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b>                                                  | <b>Output</b>                               | <b>Indikator</b>                                                                                       | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                    | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                                                                 | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah                                                                                    | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         |            |
|                                            |               |                |                                                                 |                                             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |            |
|                                            |               |                |                                                                 |                                             | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel                                                                                              |            |
|                                            |               |                |                                                                 |                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara                                                     | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |            |
|                                            |               |                |                                                                 |                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                              | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |            |
|                                            |               |                | Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter |                                             | Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                               | Program Penguatan Ideologi Paancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b>                                                            | <b>Output</b>                                                                                                         | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                             | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                                    | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                | Kebangsaan                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |            |
|                                            |               |                |                                                                           | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                      | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                             |            |
|                                            |               |                |                                                                           |                                                                                                                       | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara , Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |            |
|                                            |               |                | Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, |                                                                                                                       | Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,                                                                                                      | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan                                                                               |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b>                                                                                                                                                                      | <b>Output</b>                                                                                                                                          | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                           | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                | Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                                                                                                                                        | Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah        | Pengembangan Etika Serta Budaya Politik                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                            |               |                |                                                                                                                                                                                     | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi | Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b>                                                                                                                           | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                | Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik                                                                                                                                                                                                            | Pemantauan Situasi Politik                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                            |               |                |                |                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b>                                                            | <b>Output</b>                                                                                                                    | <b>Indikator</b>                                                                                                                   | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                              | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                                                                           |                                                                                                                                  | Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                               |                                                                                                                                                        |            |
|                                            |               |                | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan |                                                                                                                                  | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan                                                             | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                          |            |
|                                            |               |                |                                                                           | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                     |            |
|                                            |               |                |                                                                           |                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi            | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b>                                                                  | <b>Output</b>                                                                                                   | <b>Indikator</b>                                                                                                  | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                   | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                                                                                 |                                                                                                                 | Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                        |                                                                                                                                                             |            |
|                                            |               |                | Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya |                                                                                                                 | Persentase Pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                                     | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                     |            |
|                                            |               |                |                                                                                 | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                  |            |
|                                            |               |                |                                                                                 |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya                     | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b>                       | <b>Output</b> | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                                      |               | Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                     | Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                                                                                              |            |
|                                            |               |                |                                      |               | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |            |
|                                            |               |                | Meningkatnya kewaspadaan nasional di |               | Persentase kewaspadaan nasional di daerah                                                                                                                                                                     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan                                                                                                                                                  |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b>                                               | <b>Output</b>                                                                                                          | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                             | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                | daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen |                                                                                                                        | dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen                                                                                                                                        | Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                            |               |                |                                                              | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                             | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                        |            |
|                                            |               |                |                                                              |                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi | Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b> | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                |               | Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                            |               |                |                |               | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |            |
|                                            |               |                |                |               | Jumlah Orang yang Mengikuti                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama                                                                                                                                                                                                             |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b> | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                                                   | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                |               | pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |            |
|                                            |               |                |                |               | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan                             |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b> | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                               | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                |               | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah               | Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                                                         |            |
|                                            |               |                |                |               | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |            |

| <b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Outcome</b> | <b>Output</b> | <b>Indikator</b>                                                                            | <b>Program/Keg/Subkeg</b>                                                | <b>Ket</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |               |                |                |               | antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                          |            |
|                                            |               |                |                |               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota           | Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |            |

## 4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4.4

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT              | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                          | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |               |               |               |                |               |                |               |                |               | KETERANGAN                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------|
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                  | 2025                            | 2026          |               | 2027          |               | 2028           |               | 2029           |               | 2030           |               |                                          |
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                  | TARGET                          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET         | PAGU          | TARGET         | PAGU          | TARGET         | PAGU          |                                          |
| (1)               | (2)                                                                                  | (3)                                                                                  | (4)              | (5)                             | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           | (10)           | (11)          | (12)           | (13)          | (14)           | (15)          | (16)                                     |
| 8                 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                              |                                                                                      |                  |                                 | 9.316.524.209 |               | 9.523.531.000 |               | 33.670.553.289 |               | 55.928.744.945 |               | 10.077.844.492 |               |                                          |
| 8.01              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                          |                                                                                      |                  |                                 | 9.316.524.209 |               | 9.523.531.000 |               | 33.670.553.289 |               | 55.928.744.945 |               | 10.077.844.492 |               |                                          |
| 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          |                                                                                      |                  |                                 |               | 4.342.997.209 |               | 4.475.004.000 |                | 4.609.526.289 |                | 4.757.117.945 |                | 4.860.017.492 |                                          |
|                   | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)             | 89,51            | 90,30                           | 90,40         |               | 90,45         |               | 90,50          |               | 90,55          |               | 90,60          |               | - Sekretariat                            |
|                   | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah                           | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)                                   | 71,40            | 72,75                           | 72,90         |               | 73,00         |               | 73,20          |               | 73,76          |               | 75,00          |               | - Sekretariat                            |
| 8.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     |                                                                                      |                  |                                 |               | 22.000.000    |               | 24.000.000    |                | 24.000.000    |                | 24.000.000    |                | 24.000.000    |                                          |
|                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)     | 7                | 7                               | 14            |               | 14            |               | 14             |               | 16             |               | 14             |               | Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan |
| 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |                                                                                      |                  |                                 |               | 15.000.000    |               | 16.000.000    |                | 16.000.000    |                | 16.000.000    |                | 16.000.000    | Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan |
|                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)                  | 5                | 5                               | 6             |               | 6             |               | 6              |               | 8              |               | 6              |               | Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan |
| 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |                                                                                      |                  |                                 |               | 7.000.000     |               | 8.000.000     |                | 8.000.000     |                | 8.000.000     |                | 8.000.000     | Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan |
|                   | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)             | 2                | 2                               | 8             |               | 8             |               | 8              |               | 8              |               | 8              |               | Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan |
| 8.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                                                                                      |                  |                                 |               | 3.918.316.882 |               | 4.036.498.328 |                | 4.162.479.626 |                | 4.294.351.344 |                | 4.386.199.455 |                                          |
|                   | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:bulan) | 12               | 12                              | 12            |               | 12            |               | 12             |               | 12             |               | 12             |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian   |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT     | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                               | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               | KETERANGAN                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------|
|                   |                                                                             |                                                                                                           |                  | 2025                            | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                        |
|                   |                                                                             |                                                                                                           |                  | TARGET                          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                        |
| (1)               | (2)                                                                         | (3)                                                                                                       | (4)              | (5)                             | (6)    | (7)           | (8)    | (9)           | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)   | (15)          | (16)                                   |
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           |                                                                                                           |                  |                                 |        | 3.905.316.882 |        | 4.023.498.328 |        | 4.149.479.626 |        | 4.281.351.344 |        | 4.372.199.455 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)                             | 23               | 23                              | 28     |               | 28     |               | 28     |               | 28     |               | 28     |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            |                                                                                                           |                  |                                 |        | 13.000.000    |        | 13.000.000    |        | 13.000.000    |        | 13.000.000    |        | 14.000.000    | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)               | 4                | 4                               | 8      |               | 8      |               | 8      |               | 8      |               | 8      |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   |                                                                                                           |                  |                                 |        | 25.000.000    |        | 27.000.000    |        | 28.000.000    |        | 28.000.000    |        | 29.000.000    |                                        |
|                   | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)                                              | 0                | 0                               | 30     |               | 30     |               | 30     |               | 30     |               | 30     |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi               |                                                                                                           |                  |                                 |        | 25.000.000    |        | 27.000.000    |        | 28.000.000    |        | 28.000.000    |        | 29.000.000    | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang) | 0                | 0                               | 30     |               | 30     |               | 30     |               | 30     |               | 30     |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |                                                                                                           |                  |                                 |        | 83.536.327    |        | 86.661.672    |        | 90.002.663    |        | 95.452.601    |        | 98.574.037    |                                        |
|                   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:bulan)                          | 12               | 12                              | 12     |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            |                                                                                                           |                  |                                 |        | 3.087.000     |        | 3.287.000     |        | 3.500.000     |        | 3.500.000     |        | 4.000.000     | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)  | 4                | 4                               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            |                                                                                                           |                  |                                 |        | 10.000.000    |        | 10.500.000    |        | 11.000.000    |        | 11.500.000    |        | 12.200.000    | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                                  | 12               | 12                              | 3      |               | 3      |               | 3      |               | 3      |               | 3      |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT        | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                          | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |            |        |            |        |            |        |            |        | KETERANGAN |                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------------------------------------|
|                   |                                                                                |                                                                                                      |                  | 2025                            | 2026   |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                        |
|                   |                                                                                |                                                                                                      |                  | TARGET                          | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET |            | PAGU                                   |
| (1)               | (2)                                                                            | (3)                                                                                                  | (4)              | (5)                             | (6)    | (7)        | (8)    | (9)        | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)   | (15)       | (16)                                   |
| 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                      |                  |                                 |        | 6.449.327  |        | 7.134.672  |        | 8.062.663  |        | 8.152.601  |        | 8.274.037  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                      | 12               | 12                              | 3      |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       |                                                                                                      |                  |                                 |        | 3.000.000  |        | 3.000.000  |        | 3.000.000  |        | 3.000.000  |        | 3.000.000  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen) | 2                | 2                               | 12     |            | 12     |            | 12     |            | 12     |            | 12     |            | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                      |                                                                                                      |                  |                                 |        | 11.000.000 |        | 11.500.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |        | 13.000.000 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Bahan/Material                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                                    | 12               | 12                              | 1      |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                                                                                                      |                  |                                 |        | 48.000.000 |        | 48.740.000 |        | 49.740.000 |        | 54.600.000 |        | 55.100.000 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)          | 12               | 12                              | 12     |            | 12     |            | 12     |            | 12     |            | 12     |            | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          |                                                                                                      |                  |                                 |        | 2.000.000  |        | 2.500.000  |        | 2.700.000  |        | 2.700.000  |        | 3.000.000  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)                         | 12               | 12                              | 12     |            | 12     |            | 12     |            | 12     |            | 12     |            | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                                                                                                      |                  |                                 |        | 35.000.000 |        | 36.000.000 |        | 36.500.000 |        | 37.500.000 |        | 37.500.000 |                                        |
|                   | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)                                       | 3                | 7                               | 6      |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          |                                                                                                      |                  |                                 |        | 35.000.000 |        | 36.000.000 |        | 36.500.000 |        | 37.500.000 |        | 37.500.000 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)                         | 3                | 7                               | 6      |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                          | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                                                 | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |             |        |             |        |             |        |             |        | KETERANGAN  |                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------|
|                   |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                  | 2025                            | 2026   |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                        |
|                   |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                  | TARGET                          | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET |             | PAGU                                   |
| (1)               | (2)                                                                                                              | (3)                                                                                                                         | (4)              | (5)                             | (6)    | (7)         | (8)    | (9)         | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)                                   |
| 8.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                                                                                                                             |                  |                                 |        | 129.144.000 |        | 131.344.000 |        | 132.544.000 |        | 133.644.000 |        | 135.144.000 |                                        |
|                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)                                            | 12               | 12                              | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   |                                                                                                                             |                  |                                 |        | 2.000.000   |        | 2.200.000   |        | 2.400.000   |        | 2.500.000   |        | 2.500.000   | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( Dengan Satuan:Laporan )                                                     | 12               | 12                              | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          |                                                                                                                             |                  |                                 |        | 55.000.000  |        | 56.000.000  |        | 56.500.000  |        | 57.000.000  |        | 58.000.000  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)              | 12               | 12                              | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            |                                                                                                                             |                  |                                 |        | 72.144.000  |        | 73.144.000  |        | 73.644.000  |        | 74.144.000  |        | 74.644.000  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)                                | 12               | 12                              | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            |                                                                                                                             |                  |                                 |        | 130.000.000 |        | 133.500.000 |        | 136.000.000 |        | 144.170.000 |        | 149.600.000 |                                        |
|                   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)                                                           | 35               | 35                              | 39     |             | 39     |             | 43     |             | 44     |             | 45     |             | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                                                                                                                             |                  |                                 |        | 75.000.000  |        | 76.000.000  |        | 76.700.000  |        | 84.370.000  |        | 84.600.000  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit) | 7                | 7                               | 17     |             | 17     |             | 17     |             | 17     |             | 17     |             | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                               |                                                                                                                             |                  |                                 |        | 2.000.000   |        | 2.500.000   |        | 2.800.000   |        | 2.800.000   |        | 3.000.000   | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|                   | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)                                                                           | 12               | 12                              | 5      |             | 5      |             | 8      |             | 8      |             | 8      |             | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                       | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |               |        |               |        |                |        |                |        |               | KETERANGAN                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                  | 2025                            | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |               |                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                  | TARGET                          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          |                                                                                       |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                               | (4)              | (5)                             | (6)    | (7)           | (8)    | (9)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)   | (15)          | (16)                                                                                  |
| 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |        | 18.000.000    |        | 19.000.000    |        | 19.500.000     |        | 20.000.000     |        | 20.500.000    | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                                |
|                   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)                                                                                                                           | 15               | 15                              | 15     |               | 15     |               | 16     |                | 17     |                | 18     |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                                |
| 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |        | 35.000.000    |        | 36.000.000    |        | 37.000.000     |        | 37.000.000     |        | 41.500.000    | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                                |
|                   | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)                                                                                                     | 1                | 1                               | 2      |               | 2      |               | 2      |                | 2      |                | 2      |               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                                |
| 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |        | 504.000.000   |        | 515.000.000   |        | 516.000.000    |        | 521.000.000    |        | 541.000.000   |                                                                                       |
|                   | Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                                        | Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)                                                                                                   | 73               | 75                              | 77     |               | 79     |               | 81     |                | 83     |                | 85     |               | - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama |
| 8.01.02.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |        | 504.000.000   |        | 515.000.000   |        | 516.000.000    |        | 521.000.000    |        | 541.000.000   |                                                                                       |
|                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                           | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Kegiatan)                                                  | 23               | 23                              | 2      |               | 2      |               | 2      |                | 2      |                | 2      |               | Ketua Tim Kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                       |
| 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |        | 504.000.000   |        | 515.000.000   |        | 516.000.000    |        | 521.000.000    |        | 541.000.000   | Ketua Tim Kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                       |
|                   | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen) | 1                | 1                               | 1      |               | 1      |               | 1      |                | 1      |                | 1      |               | Ketua Tim Kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                       |
| 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                            |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |        | 3.780.480.000 |        | 3.786.480.000 |        | 27.790.480.000 |        | 49.835.480.000 |        | 3.800.480.000 |                                                                                       |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |               |        |               |        |                |        |                |        | KETERANGAN    |                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 2025                            | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |               |                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | TARGET                          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET |               | PAGU                                                        |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)              | (5)                             | (6)    | (7)           | (8)    | (9)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)   | (15)          | (16)                                                        |
|                   | Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                  | Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ( Dengan Satuan:Persen)                              | 73               | 75                              | 77     |               | 79     |               | 81     |                | 83     |                | 85     |               | - Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan |
| 8.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                 |        | 3.780.480.000 |        | 3.786.480.000 |        | 27.790.480.000 |        | 49.835.480.000 |        | 3.800.480.000 |                                                             |
|                   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ( Dengan Satuan:Kegiatan)                                                    | 4                | 4                               | 2      |               | 2      |               | 2      |                | 2      |                | 2      |               | Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri                        |
| 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                 |        | 3.780.480.000 |        | 3.786.480.000 |        | 27.790.480.000 |        | 49.835.480.000 |        | 3.800.480.000 | Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri                        |
|                   | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ( Dengan Satuan:Orang) | 100              | 100                             | 100    |               | 1600   |               | 110    |                | 120    |                | 130    |               | Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri                        |
| 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                 |        | 67.000.000    |        | 72.000.000    |        | 73.000.000     |        | 75.000.000     |        | 85.000.000    |                                                             |
|                   | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan ( Dengan Satuan:Persen)                                                                                                                                                                                                                  | 72               | 72                              | 74     |               | 78     |               | 82     |                | 86     |                | 90     |               | - Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                              | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             | KETERANGAN                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                  | 2025                            | 2026   |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                  | TARGET                          | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                                                       |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                                                      | (4)              | (5)                             | (6)    | (7)         | (8)    | (9)         | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)                                                                                  |
| 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |        | 67.000.000  |        | 72.000.000  |        | 73.000.000  |        | 75.000.000  |        | 85.000.000  |                                                                                       |
|                   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                            | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan:Kegiatan)                                              | 2                | 2                               | 2      |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             | Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan                                             |
| 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                      |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |        | 67.000.000  |        | 72.000.000  |        | 73.000.000  |        | 75.000.000  |        | 85.000.000  | Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan                                             |
|                   | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang) | 150              | 100                             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 110    |             | 120    |             | Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan                                             |
| 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |        | 207.047.000 |        | 171.047.000 |        | 172.547.000 |        | 178.547.000 |        | 193.547.000 |                                                                                       |
|                   | Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                                                                                                             | Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Dengan Satuan:Persen)                                                                                                     | 73               | 75                              | 77     |             | 79     |             | 81     |             | 83     |             | 85     |             | - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama |
| 8.01.05.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |        | 207.047.000 |        | 171.047.000 |        | 172.547.000 |        | 178.547.000 |        | 193.547.000 |                                                                                       |
|                   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                             | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Dengan Satuan:Kegiatan)                                                               | 5                | 3                               | 3      |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             | Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama                           |
| 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |        | 80.000.000  |        | 85.000.000  |        | 86.000.000  |        | 90.000.000  |        | 100.000.000 | Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama                           |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                                                                 | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |             |        |             |        |             |        |             |        | KETERANGAN  |                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 2025                            | 2026   |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                  | TARGET                          | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET |             | PAGU                                                        |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                                                         | (4)              | (5)                             | (6)    | (7)         | (8)    | (9)         | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)                                                        |
|                   | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang) | 200              | 100                             | 100    |             | 2100   |             | 100    |             | 110    |             | 120    |             | Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama |
| 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                 |        | 127.047.000 |        | 86.047.000  |        | 86.547.000  |        | 88.547.000  |        | 93.547.000  | Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama |
|                   | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)            | 175              | 175                             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 110    |             | 120    |             | Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama |
| 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                 |        | 415.000.000 |        | 504.000.000 |        | 509.000.000 |        | 561.600.000 |        | 597.800.000 |                                                             |
|                   | Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen                                                                                                                                                          | Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (Dengan Satuan:Persen)                                                                                                                      | 100              | 100                             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik        |
| 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                 |        | 415.000.000 |        | 504.000.000 |        | 509.000.000 |        | 561.600.000 |        | 597.800.000 |                                                             |
|                   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                    | 5                | 12                              | 12     |             | 13     |             | 13     |             | 13     |             | 13     |             | Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen    |
| 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                 |        | 73.000.000  |        | 78.000.000  |        | 79.000.000  |        | 85.000.000  |        | 95.000.000  | Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen    |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            | KETERANGAN                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 2025                            | 2026   |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | TARGET                          | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                                                          |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (4)              | (5)                             | (6)    | (7)        | (8)    | (9)        | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)   | (15)       | (16)                                                     |
|                   | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)       | 4                | 4                               | 4      |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            | Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                 |        | 51.000.000 |        | 56.000.000 |        | 57.000.000 |        | 63.000.000 |        | 68.000.000 | Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik                       |
|                   | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)                   | 5                | 4                               | 4      |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            | Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik                       |
| 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                 |        | 75.000.000 |        | 80.000.000 |        | 81.000.000 |        | 86.000.000 |        | 91.000.000 | Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
|                   | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah              | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang) | 540              | 100                             | 100    |            | 100    |            | 100    |            | 110    |            | 120    |            | Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                 |        | 80.000.000 |        | 85.000.000 |        | 86.000.000 |        | 91.000.000 |        | 96.000.000 | Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik                       |

| KODE              | BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |             |               |             |                |             |                |             |                |             | KETERANGAN                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 2025                            | 2026          |             | 2027          |             | 2028           |             | 2029           |             | 2030           |             |                                                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | TARGET                          | TARGET        | PAGU        | TARGET        | PAGU        | TARGET         | PAGU        | TARGET         | PAGU        | TARGET         | PAGU        |                                                          |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)              | (5)                             | (6)           | (7)         | (8)           | (9)         | (10)           | (11)        | (12)           | (13)        | (14)           | (15)        | (16)                                                     |
|                   | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)                    | 390              | 390                             | 100           |             | 1600          |             | 100            |             | 110            |             | 120            |             | Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik                       |
| 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                 |               | 6.000.000   |               | 8.000.000   |                | 8.000.000   |                | 8.800.000   |                | 10.000.000  | Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik                       |
|                   | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan) | 1                | 1                               | 1             |             | 1             |             | 1              |             | 1              |             | 1              |             | Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik                       |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                 |               | 130.000.000 |               | 197.000.000 |                | 198.000.000 |                | 227.800.000 |                | 237.800.000 | Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
|                   | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                                                                                                                                           | 4                | 4                               | 4             |             | 4             |             | 4              |             | 4              |             | 4              |             | Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL:           |                                 | 9.316.524.209 |             | 9.523.531.000 |             | 33.670.553.289 |             | 55.928.744.945 |             | 10.077.844.492 |             |                                                          |

#### 4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

**Tabel 4.4**

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| <b>No</b>  | <b>Program Prioritas</b>                                    | <b>Outcome</b>                                               | <b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>                                           | <b>Ket</b>                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                  | <b>(3)</b>                                                   | <b>(4)</b>                                                             | <b>(5)</b>                                                           |
| 1          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Mendukung Program Unggulan Bupati <b>Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun</b> |
|            |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |                                                                        |                                                                      |
|            |                                                             |                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                      |
|            |                                                             |                                                              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                      |
|            |                                                             |                                                              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          |                                                                      |
|            |                                                             |                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                                                      |
|            |                                                             |                                                              | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |                                                                      |
|            |                                                             |                                                              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                       |                                                                      |
|            |                                                             |                                                              | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |                                                                      |
|            |                                                             |                                                              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              |                                                                      |

| No  | Program Prioritas | Outcome | Kegiatan/ Subkegiatan                                                        | Ket |
|-----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)               | (3)     | (4)                                                                          | (5) |
|     |                   |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |     |
|     |                   |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |     |
|     |                   |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |     |
|     |                   |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |     |
|     |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                                    |     |
|     |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |     |
|     |                   |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |     |
|     |                   |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |     |
|     |                   |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |     |
|     |                   |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |     |
|     |                   |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |     |
|     |                   |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |     |
|     |                   |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |     |
|     |                   |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |     |
|     |                   |         | Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan                   |     |

| No  | Program Prioritas                                                                                                                      | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                       | Kegiatan/ Subkegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ket |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5) |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 2   | Program Penguatan Ideologi Paancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                          | Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                         |     |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                       |     |
| 3   | Program Peningkatan Peran PartailPolitik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> |     |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya                                                                                                                                                                                                                       |     |

| No  | Program Prioritas                                                        | Outcome                                                                         | Kegiatan/ Subkegiatan                                                                                                                                                                        | Ket |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                          | (5) |
|     |                                                                          |                                                                                 | Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |     |
| 4   | Pogram Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan             | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan       | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                    |     |
|     |                                                                          |                                                                                 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                       |     |
| 5   | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                     |     |
|     |                                                                          |                                                                                 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  |     |
|     |                                                                          |                                                                                 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |     |

| <b>No</b>  | <b>Program Prioritas</b>                                                                                   | <b>Outcome</b>                                                                                    | <b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ket</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                 | <b>(3)</b>                                                                                        | <b>(4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(5)</b> |
| 6          | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                         |            |
|            |                                                                                                            |                                                                                                   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah             |            |
|            |                                                                                                            |                                                                                                   | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |            |
|            |                                                                                                            |                                                                                                   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                |            |
|            |                                                                                                            |                                                                                                   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama                                                                                                                                                                                                           |            |

| <b>No</b>  | <b>Program Prioritas</b> | <b>Outcome</b> | <b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ket</b> |
|------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>               | <b>(3)</b>     | <b>(4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(5)</b> |
|            |                          |                | Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                       |            |
|            |                          |                | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |            |
|            |                          |                | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                     |            |

**4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

| NO | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                              |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| 1  | Tujuan :                                                                                                     |        |              |      |      |      |      |      |      |
|    | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikalisme dan Sumber Daya Ekonomi | Persen | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| 2  | Sasaran :                                                                                                    |        |              |      |      |      |      |      |      |
|    | Jumlah Kejadian Konflik SARA                                                                                 | Kali   | 5            | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    |      |

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

| NOMOR | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET. |
|-------|-----------|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|       |           |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
|       | Nihil     | -      | -            | -    | -    | -    | -    | -    |      |

BAB V  
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih Tahun 2024, khususnya dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, diharapkan tercipta sinergi antar perangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan integrasi nasional. Komitmen untuk menguatkan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, deteksi dan cegah dini terhadap potensi konflik, serta penguatan kelembagaan politik menjadi bagian integral dalam membangun Kabupaten Kebumen yang aman, tertib, dan berdaya saing.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dan responsif dalam menghadapi dinamika sosial politik ke depan. Pelaksanaan dan pencapaiannya tentu memerlukan kerja sama lintas sektor serta pengawasan yang berkelanjutan, guna memastikan setiap target dan indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal demi terwujudnya Kebumen *"Berdaya : Kebumen Beriman Maju Sejahtera Berbudaya."*

Kebumen, 19 September 2025



Bupati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

WIBAWA MOKO, S.H., M.H.

Kepala Muda

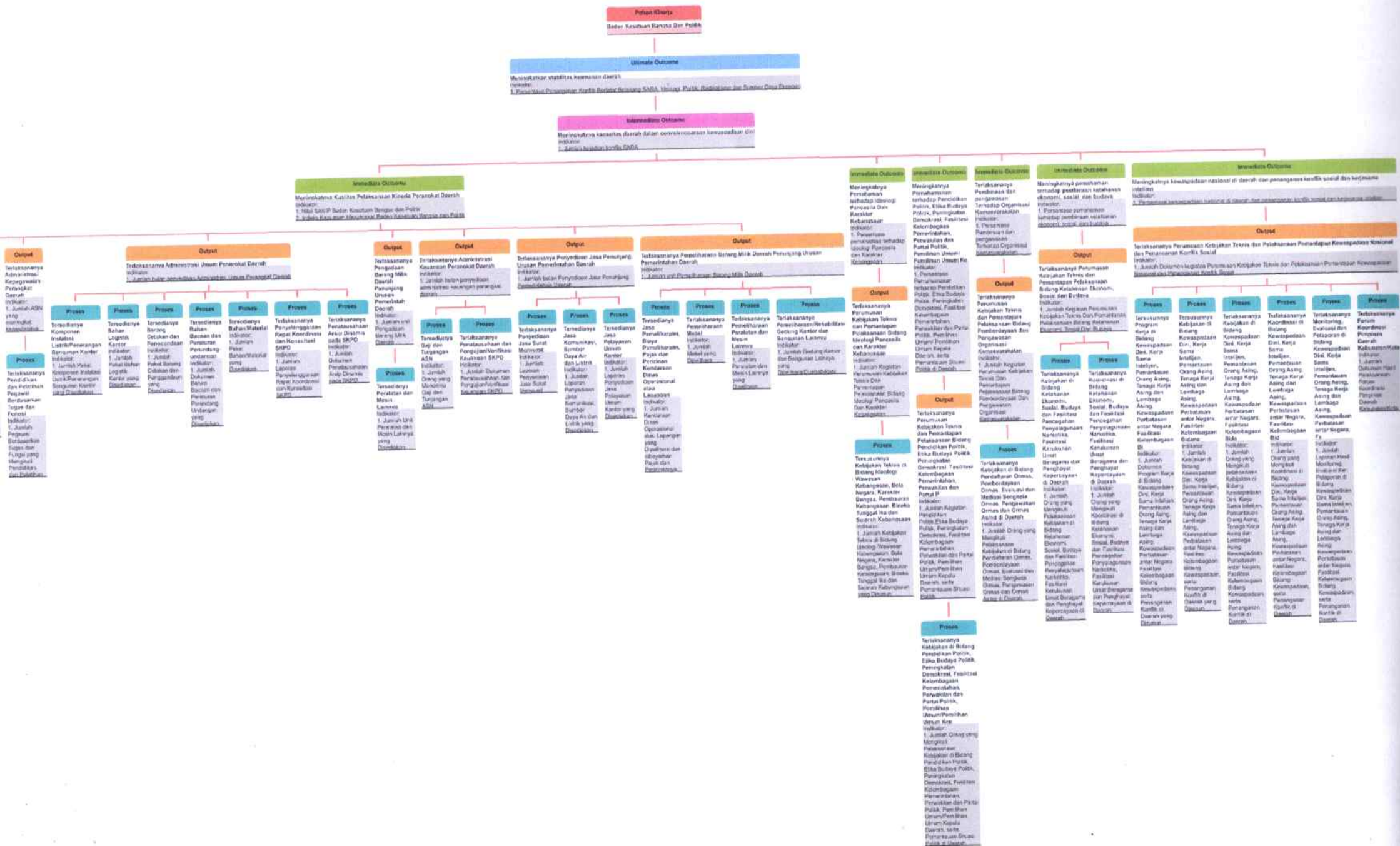
NIP. 196811281996031006

| TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA |              |
|---------------------------------------|--------------|
| NAMA                                  | TANDA TANGAN |
| Agus Setyanan                         |              |
| Cahyo Riyadi                          |              |
|                                       |              |



# LAMPIRAN

## POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



## CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





Kebumen, 18 Maret 2025

Nomor : 000.7.2 / 98 / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen  
3. Terlampir  
di  
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
tempat : Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) Jalan Rumah Sakit Lama Kebumen  
acara : Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen  
keterangan : Ketua FKUB untuk mengirimkan perwakilan dari unsur keagamaan (6 orang)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Widiatmoko, S.H, MH.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196811281996031006

## TUJUAN SURAT

| No. | Tujuan                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen                                     |
| 2.  | Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen                                                                        |
| 3.  | Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                      |
| 4.  | Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga                                                          |
| 5.  | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                         |
| 6.  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja                                                                         |
| 7.  | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen                                                      |
| 8.  | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen                                                          |
| 9.  | Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen                                                                     |
| 10. | Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kebumen                                                             |
| 11. | Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kebumen                                                             |
| 12. | Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kebumen                                                |
| 13. | Ketua Partai Demokrat Kebumen                                                                             |
| 14. | Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kebumen                                                                |
| 15. | Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kebumen                                                          |
| 16. | Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kebumen                                                              |
| 17. | Ketua Partai GERINDRA Kebumen                                                                             |
| 18. | Ketua Partai NASDEM Kebumen                                                                               |
| 19. | Kepala Polres Kebumen                                                                                     |
| 20. | Dandim 0709 Kebumen                                                                                       |
| 21. | Ketua KPU Kebumen                                                                                         |
| 22. | Ketua Bawaslu Kebumen                                                                                     |
| 23. | Ketua FKDM Kabupaten Kebumen                                                                              |
| 24. | Ketua FKUB Kabupaten Kebumen                                                                              |
| 25. | Ketua PCNU Kabupaten Kebumen                                                                              |
| 26. | Ketua GOW Kabupaten Kebumen                                                                               |
| 27. | Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen                                                                        |
| 28. | Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kebumen                                                            |
| 29. | Tim Penyelenggara Forum PD Bakesbangpol Kab. Kebumen (Kabid menyertakan subkoordinator/JFT masing-masing) |

## DOKUMENTASI

### FORUM PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN HARI/TANGGAL : KAMIS, 12 FEBRUARI 2026









**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029**

Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, Bappeda Kabupaten Kebumen, dan BPKPD Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
Jam : Pukul 12.00 WIB  
Tempat : Aula Sekretariat Bersama Jl. Rumah Sakit Lama Kebumen

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029:

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini..
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

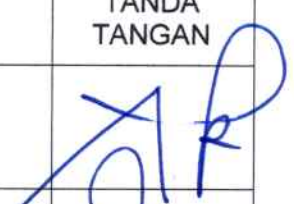
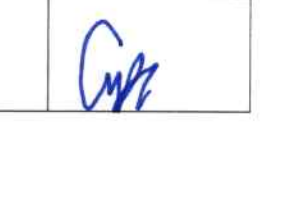
Kebumen, 19 Maret 2025

Pimpinan Sidang  
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Kebumen



Widiatmoko, S.H.,M.H.

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

| No. | Nama                        | Lembaga/ Instansi                                 | Jabatan/<br>Alamat | TANDA<br>TANGAN                                                                       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Agung Pambudi, S.IP., M.Si. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kebumen | Kebumen            |    |
| 2.  | M Madkhan Anis              | Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen                   | Kebumen            |    |
| 3.  | Dzakiatul Banat             | KPU Kabupaten Kebumen                             | Kebumen            |    |
| 4.  | Kompol Joko Maryono         | Polres Kebumen                                    | Kebumen            |   |
| 5.  | Cahyo Ngadmanto, S.H.       | BAPPEDA Kabupaten Kebumen                         | Kebumen            |  |
| 6.  | Heri Setyanto               | FKDM Kabupaten Kebumen                            | Kebumen            |  |
| 7.  | Cut Mutia H                 | Forum Anak Kabupaten Kebumen                      | Kebumen            |  |

DELEGASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2025-2029

| No | Nama                           | Instansi               | Alamat  | Tanda Tangan                                                                          |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KH. Drs. Azhar Muhammadi, M.Ag | FKUB Kabupaten Kebumen | Kebumen |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Arungbinang No: 15 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311  
Telepon (0287) 384088, Faksimile (0287) 384088,  
Laman [www.kesbangpol.kebumenkab.go.id](http://www.kesbangpol.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [kesbangpolkebumen@gmail.com](mailto:kesbangpolkebumen@gmail.com)

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR :000.7.2.2/ 26 /KEP/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**TAHUN 2025-2029**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, sesuai arah kebijakan dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :
1. Mereview hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
  2. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
  3. Merumuskan tujuan, sasaran dan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

4. Merumuskan kegiatan prioritas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
5. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renstra sesuai bidangnya masing-masing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
6. Melaksanakan penyempurnaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas hasil telaahan, koreksi dan masukan sesuai bidangnya masing-masing.
7. Bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kebumen.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 2 Desember 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 000.7.2.2/ 26 /KEP/  
2024  
TANGGAL : 2 Desember 2024

DAFTAR TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2025-2029

| NO | NAMA/NIP                                                      | JABATAN DALAM DINAS                                                                     | JABATAN DALAM TIM |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | WIDIATMOKO, S.H.,M.H.<br>196811281996031006                   | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                | Ketua             |
| 2  | TRI TUNGGALEKO SAPTO,<br>S.KM.,MPH.<br>197201051994031006     | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                            | Sekretaris        |
| 3  | PRATIKNO, S.Sos.<br>196911021995101001                        | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | Anggota           |
| 4  | RISSEON P. SIHOTANG,<br>S.Sos.,M.Si.<br>196707221987031003    | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan                        | Anggota           |
| 5  | DEVI ARIFIN SETYO<br>PURWOKO, S.SIT.<br>198202012003121005    | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik                               | Anggota           |
| 6  | SUMARWOTO, S.ST.<br>197601291996031001                        | Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan                                          | Anggota           |
| 7  | NITA YUNIATI, S.H.<br>198306182011012010                      | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                                                   | Anggota           |
| 8  | HERU WIBOWO, S.Sos.<br>197502071996031001                     | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                                            | Anggota           |
| 9  | SRI KANTHI ARY<br>PUSPTANINGRUM, S.Psi.<br>198808292011012006 | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                                            | Anggota           |
| 10 | PRIMAT KARUNIAN TO,<br>S.Tr.Sos, M.M<br>198604032006041002    | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                                            | Anggota           |
| 11 | DANNY HERAWAN, S.STP.<br>198604032006041002                   | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                                            | Anggota           |

|    |                                                     |                       |         |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 12 | SUMYONO, A.Md.Akun.<br>196804032007011044           | Bendahara Pengeluaran | Anggota |
| 12 | NUR AZMIYATI, A.Md.<br>198701162010012017           | Pranata Komputer      | Anggota |
| 13 | UKKY TRY LESTARI, A.Md.<br>199308082022032006       | Verifikator Keuangan  | Anggota |
| 14 | WIWIT ANJAR LESTARI,<br>A.Md.<br>199405202024212015 | Arsiparis Terampil    | Anggota |



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

WIDIATMOKO